

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA DI HUTAN
MANGROVE WONOREJO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR**

Dea Yilfiana Putri

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dheayulfiana@gmail.com

Rachmawati Novaria

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nova@untag-sby.ac.id

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Mangrove forests have an important role in providing protection for coastlines from erosion, hurricanes and sea waves. This includes the uniqueness of mangrove forests and makes them a type of habitat or ecosystem that is second to none (DKPP Surabaya, 2022). The aim of this research is to determine the suitability of implementing environmental management policies in efforts to empower resources in mangrove forests with the theory of George Edward III. The method chosen and implemented in this research is descriptive qualitative with data acquisition techniques through interviews, field observations and documentation studies. The data obtained was then analyzed and processed in several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and data withdrawal. The results of this research are the suitability of the application of environmental management in efforts to empower resources in mangrove forests with George Edward III's theory and it is effectively implemented so that policies can run well.

Keywords: *Implementation, policy, Mangrove*

ABSTRAK

Hutan mangrove memiliki peran penting guna memberi perlindungan bagi garis Pantai oleh erosi, angin topan serta gelombang laut. Hal ini termasuk pada keunikan hutan mangrove dan menjadikannya menjadi jenis habitat atau ekosistem yang tidak ada duanya (DKPP Surabaya, 2022). Penelitian ini tujuannya guna menilai seberapa jauh implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan sumberdaya di hutan mangrove

dengan teori milik George Edward III. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menerapkan teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi sebagai metode perolehan data. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Hasil penelitian ini seperti penyesuaian implementasi pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pemberdayaan sumberdaya di hutan mangrove dengan teori George Edward III dan efektif dilakukan maka kebijakan dapat berjalan baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Mangrove*

A. PENDAHULUAN

Hutan Mangrove adalah salah satu bentuk ekowisata yang banyak memberikan kontribusi manfaat bagi lingkungan hidup hingga ekonomi masyarakat pesisir (Gobel & Wunarlan, 2023). Mangrove sebagai industri wisata berpotensi dalam mengedepankan keberlanjutan dan konservasi sumber daya alam. Ekowisata Mangrove yang terletak di Wonorejo, Kecamatan Rungkut menjadi salah satu potensi keindahan alam dan kekayaan budaya yang terletak di Kota Surabaya. Terlebih lagi, kawasan hutan mangrove tersebut sudah ditentukan menjadi hutan lindung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Mufid, 2019). Keberadaan hutan mangrove termasuk Ekowisata Mangrove Wonorejo termasuk dalam upaya untuk menjaga lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai.

Lingkungan hidup memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis ekosistem. Lingkungan yang rapi serta teratur dapat menciptakan keselarasan serta keseimbangan dari lingkungan rumah serta alam disekitar. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup yang ideal. Berbagai jenis polusi memberikan ancaman tersendiri bagi keberlangsungan lingkungan hidup yang seimbang. Kekayaan SDA serta keanekaragaman hayati di Indonesia dihadapkan dari berbagai isu lingkungan yang serius. Adapun bentuknya seperti deforestasi dan kerusakan hutan, perubahan iklim dan kenaikan permukaan iklim, polusi udara dan air, hilangnya habitat alami dan kerusakan ekosistem, hingga polusi plastik (Fadjri & Adhyana, 2023). Sedangkan pendidikan, akses informasi, lingkungan hidup, partisipasi, serta keadilan menjadi hak setiap orang yang ditegaskan dalam Pasal 65 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 (Turisno et al., 2018).

Wilayah pesisir sebagai daerah peralihan laut dan darat pun banyak menghadapi tekanan dari berbagai aktivitas manusia maupun fenomena darat dan laut (Pinto, 2016). Perubahan lebih rentan terjadi di wilayah pesisir sehingga memerlukan perlindungan dan pengelolaan secara lebih lanjut guna mendapatkan kebermanfaatan yang lebih tinggi bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat (Turisno et al., 2018).

Pemerintah Indonesia berupaya mengambil langkah-langkah untuk menjaga lingkungan hidup dengan disahkannya Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Dari peraturan ini, dikatakan bahwa meningkatkan akses bagi masyarakat miskin guna mengelola serta

memanfaatkan lingkungan hidup serta SDA dilaksanakan dari macam-macam program. Pemerintah Indonesia pun memiliki rencana perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir melalui pembangunan kepariwisataan berbasis wisata alam dalam bentuk hutan mangrove.

Hutan mangrove adalah istilah yang dipakai guna mengetahui komunitas vegetasi di pesisir tropis yang didominasi dari spesies-spesies pohon khas maupun semak yang dapat bertumbuh di wilayah pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 2000). Mangrove merupakan ekosistem yang terletak di daerah intertidal, dimana adanya interaksi yang intens dari air laut, Sungai, air payau, serta daratan. Interaksi tersebut menyebabkan ekosistem mangrove memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi (Tri Martuti, 2014).

Menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian No. 60/Kpts/DJ/I/1978 mengenai silvikultur hutan payau, hutan mangrove yakni jenis hutan yang berada di sepanjang garis pantai serta tepi sungai yang terkena dampak pasang surut air laut. Selain itu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/MENHUT-V/2004, Hutan mangrove ialah hutan yang berkembang di tanah aluvial di kawasan pantai serta sekitaran muara sungai, yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Biasanya, mangrove bersistem akar yang menonjol yang dikenal sebagai akar nafas (pneumatofor). Sistem perakaran itu adalah bentuk adaptasi pada kondisi tanah dengan kadar oksigen rendah hingga tanpa oksigen (Yunan, 2013).

Selain menjadi wisata alam, Hutan mangrove berperan sangat penting guna menjaga keseimbangan kualitas lingkungan serta menetralkan zat-zat pencemar. Tumbuhan ini sangat berbeda dari tanaman lain yang ditemukan di hutan pedalaman subtropic serta tropis, melainkan bisa disebut sebagai Hutan yang tumbuh di tepi laut memiliki kemampuan beradaptasi dengan luar biasa. Meskipun akar sering terendam air, hutan ini mampu bertahan dalam keadaan alam yang ekstrem misalnya tingginya konsentrasi garam serta salinitas yang tinggi. Konservasi hutan mangrove diikuti dengan berbagai harapan seperti alat untuk melindungi wilayah pantai, memelihara keberagaman fauna, pencegah banjir. Mengurangi risiko bahaya tsunami, dan lain sebagainya (Tri, 2009). Hutan mangrove memiliki peran penting guna memberi perlindungan bagi garis Pantai oleh erosi, angin topan serta gelombang laut. Hal ini termasuk pada keunikan hutan mangrove dan menjadikannya menjadi jenis habitat atau ekosistem yang tidak ada duanya (DKPP Surabaya, 2022).

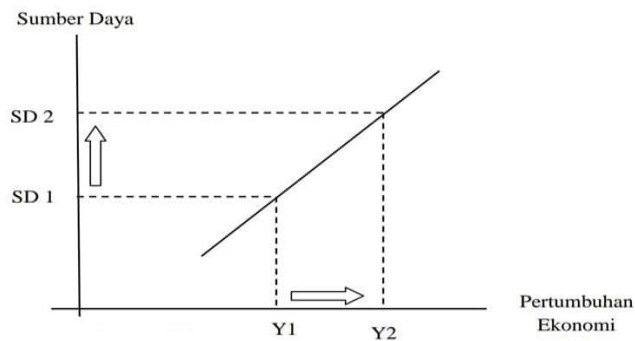
Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Surabaya, telah mengembangkan rencana untuk proyek ekowisata di hutan mangrove. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pengembangan area ekowisata hutan mangrove di sejumlah wilayah termasuk Wonorejo, Kecamatan Rungkut. Hutan mangrove Wonorejo memiliki luas 7Ha dan khususnya dari daerah Pamurbaya maupun Pantai Timur Surabaya (Wahyuni et al., 2015). Model ekowisata yang direncanakan akan mengedepankan tidak hanya keindahan alam dan ragam flora serta fauna di hutan mangrove di pantai timur Surabaya sebagai daya tarik utamanya, tetapi pula memberi objek wisata serta fasilitas tambahan hingga menjadi wujud pengembangan sumber pangan alternatif (DKPP Surabaya, 2023). Adapun bentuk fasilitas yang disediakan meliputi lahan parkir, kantor pengelola, tracking, lahan

pembibitan, toilet umum, mushola, dermaga, area bermain anak, gazebo, loker, dan jogging track.

Penanaman mangrove di Wonorejo, Surabaya salah satunya berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi hingga banjir rob (Admin, 2022). Kawasan ini merupakan ekowisata yang menawarkan suasana teduh dan alami di tengah panasnya kota Surabaya serta berperan penting dalam edukasi lingkungan dan konservasi alam. Ekowisata mangrove Wonorejo dijalankan dengan konsep Konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove diintegrasikan sebagai bagian dari program wisata, dengan fokus pada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan memperkuat konsep ekowisata. Ini juga melibatkan penegakan hukum dan regulasi untuk memastikan fungsi ekosistem mangrove tetap terjaga secara efektif di kawasan tersebut (Wahyuni et al., 2015). Namun, tanpa upaya konservasi yang kuat, keberadaan ekowisata ini bisa terancam oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan ekowisata yang baik dapat menjadi contoh harmonisasi antara ekonomi dan lingkungan.

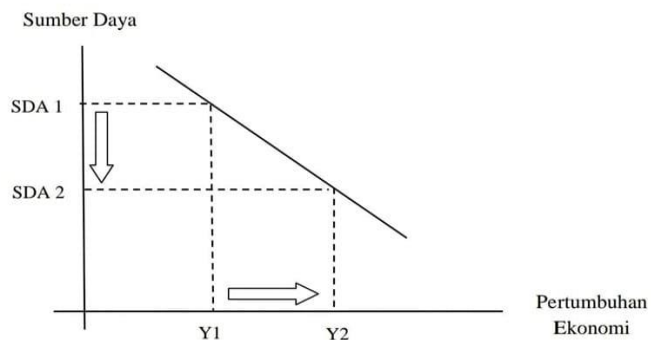
Salah satu faktor mengapa hutan mangrove mengalami kerusakan adalah karena dampak dari pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia yang mendorong percepatan ekonomi, terdapat risiko eksploitasi sumber daya alam yang lebih tinggi. Maka bisa dinyatakan bahwa kualitas serta jumlah barang dari sumber daya kecuali alam berhubungan positif dari pertumbuhan ekonomi, sementara keterlibatan pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya SDA yang terdapat di bumi bersifat negatif. Pembangunan industri, terminal, Pelabuhan, serta infrastruktur lain menunjukkan adanya kemajuan kegiatan ekonomi. Kemajuan ini dapat berkontribusi pada percepatan kerusakan hutan mangrove.

Pertumbuhan ekonomi secara cepat di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia seringkali berdampak pada eksploitasi SDA yang melimpah, termasuk hutan mangrove. Pembangunan industri, terminal, Pelabuhan, serta prasarana lain sebagai indikator meningkatkan aktivitas ekonomi dapat mempercepat kerusakan hutan mangrove. Maka, penting untuk pemerintah maupun masyarakat dalam mencari solusi yang dapat mengharmoniskan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap alam. Kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan harus menjadi prioritas dalam setiap rencana pembangunan.



Gambar 2.1 Hubungan antara Sumber Daya (selain Sumber Daya Alam) dengan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Sumakul 2012

Gambar 2.1 memperlihatkan hubungan dari kesediaan sumber daya (kecuali sumber daya alam) dari pertumbuhan ekonomi. Sumbu vertikal memperlihatkan tersedia sumber daya (kecuali sumber daya alam) serta sumbu horizontal memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kurva itu memperlihatkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat contohnya dari Y1 ke arah Y2 dapat mengakibatkan peningkatan beberapa ketersediaan sumber daya dari SD 1 ke SD 2.



Gambar 2.2 Hubungan antara Sumber Daya Alam dengan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Sumakul 2012

Selain itu Gambar 2.2 memperlihatkan hubungan dari kesediaan SDA melalui pertumbuhan ekonomi. Sumbu vertikal memperlihatkan tersedia sumber daya alam, selain itu sumbu horizontal memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif oleh gambar itu bisa diketahui oleh kemiringan secara negatif (ke kiri). Kurva itu memperlihatkan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat contohnya pada Y1 ke arah Y2, dapat mengakibatkan turunnya total ketersediaan SDA dari SDA 1 ke arah SDA 2.

Tidak hanya itu, keberadaan hutan mangrove juga menghadapi ancaman seperti halnya keberadaan sumber daya alam lainnya. Terdapat risiko kerusakan akibat penebangan liar, pencemaran oleh limbah, hingga akumulasi sampah. Dua hektare lahan mangrove di Surabaya sempat mengalami kerusakan karena

tumpukan sampah yang berdampak pada pertumbuhan tanaman pada habitatnya (Arfani, 2015). Artinya, kehidupan manusia di pesisir pantai maupun wilayah lainnya sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem hutan mangrove. Masalah ini menyoroti perlunya penanganan sampah yang lebih baik dan upaya konservasi yang lebih intensif untuk melindungi ekosistem mangrove yang vital. Sampah yang menumpuk tidak sekedar merusak pemandangan namun pula mengganggu habitat alami. Upaya bersama dari pemerintah serta masyarakat diperlukan dalam mengatasi masalah ini. Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan harus terus ditingkatkan.

B. LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (dalam Irfan Islamy, 2003:18) menjelaskan kebijakan publik menjadi setiap aktivitas yang diputuskan dari pemerintah guna dilaksanakan maupun diabaikan. James Anderson (dalam Winarno, 2014:21) menjelaskan Kebijakan publik adalah panduan tindakan yang dirancang oleh satu atau lebih pihak untuk menangani suatu masalah atau persoalan tertentu. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan, yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan politik Soleman et al (2021). Selaras dengan apa yang disampaikan Udoji (dalam Solichin Abdul Wahab 2012:126) bahwa Pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang sangat penting, bahkan bisa jadi lebih krusial dibandingkan dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Mazmanian (dalam Wabab, 2002:440) membagi proses implementasi kebijakan menjadi tiga variabel, yakni:

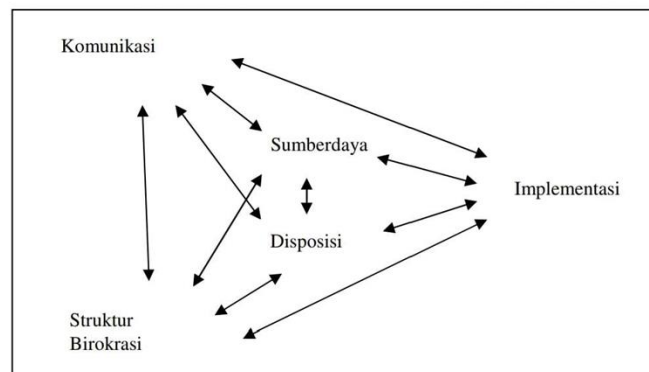
1. Variabel independent ialah Kemudahan atau kesulitan dalam mengendalikan masalah tergantung pada indikator permasalahan, teori serta teknis pelaksanaan, ragam objek, serta jenis perubahan yang diinginkan.
2. Variabel intervening ialah Variabel kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan tahap implementasi mencakup beberapa indikator, yaitu: kejelasan serta konsistensi tujuan, penggunaan teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya, keterpaduan hierarkis antar lembaga pelaksana, ketentuan pelaksana dari lembaga pelaksana serta proses perekrutan pejabat pelaksana, aturan serta keterbukaan terhadap pihak luar. Selain itu, terdapat variabel eksternal yang mempengaruhi proses implementasi, termasuk keadaan sosial ekonomi maupun teknologi, dukungan publik, dukungan dari pejabat yang lebih tinggi, dan kualitas serta komitmen kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen ialah Proses implementasi kebijakan melibatkan lima tahap pemahaman oleh lembaga atau badan pelaksana, yang meliputi: Penyusunan kebijakan pelaksana, kepatuhan objek atau pihak yang terkena dampak kebijakan, hasil nyata dari pelaksanaan kebijakan, penerimaan terhadap hasil nyata tersebut, rvisi kebijakan berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan.

Menurut George C. Edward (Edward III) dalam Budi Winarno (2006:157-158) terdapat empat faktor atau indikator yang perlu diketahui untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan efektif, yakni:

1. Komunikasi merupakan vaktor terpenting yang berengaruh bagi pelaksanaan kebijakan publik dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuannya. Keberhasilan implementasi kebijakan publik tergantung pada pemahaman para pembuat keputusan tentang tugas yang harus dilakukan, yang hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang efektif. Ada tiga penanda yang bisa dipakai untuk menilai keberhasilan variabel komunikasi ini. Edward III dalam Winarno (2002:157-158) menyebutkan tiga faktor itu yakni: 1. Transmisi. Saluran komunikasi yang efektif dapat memperoleh implementasi yang efektif juga. Masalah sering muncul dari saluran komunikasi, seperti miskomunikasi yang diakibatkan dari kompleksitas birokrasi yang wajib dilakukan saat tahap komunikasi, maka tujuan yang diharapkan sering kali tidak tercapai sepenuhnya. 2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima dari pelaksana kebijakan (*streetlevel-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan kebingungan. 3. Konsistensi. Komunikasi yang didapatkan dari pelaksana perlu konsisten serta jelas agar dapat digunakan dengan baik. Apabila instruksi yang diberikan seringkali berubah, hal ini bisa menyebabkan kebingungan bagi pelaksana dalam melakukan tugasnya.
2. Sumber daya adalah elemen terpenting dari pelaksanaan kebijakan yang efektif. Berbagai indikator yang dipakai guna mengevaluasi pengaruh sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi:
 - a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level-bureaucrats*). Salah satu penyebab kegagalan umum dalam implementasi kebijakan adalah kekurangan atau ketidakcukupan kompetensi staf atau pegawai dalam bidang mereka. Hanya menambah jumlah staf dan pelaksana saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan. Diperlukan staf yang memadai dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai (kapabel serta kompeten) dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
 - b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk yakni: pertama, Informasi tentang pelaksanaan kebijakan. Kedua, Informasi tentang tingkat kepatuhan pelaksana pada ketentuan pemerintah yang sudah ditentukan.
 - c. Fasilitas. Fasilitas fisik memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun implementor memiliki tim yang memadai, berkualitas, serta kompeten, tanpa dukungan fasilitas (sarana dan prasarana), keberhasilan implementasi kebijakan itu tidak dapat terjamin.
3. Disposisi Menurut Edward III dalam Budi Winarno (2002:142-143) menjelaskan “disposisi maupun kecenderungan ialah salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan pada efektivitas implementasi kebijakan.”. Apabila para pelaksana memiliki kecenderungan positif maupun dukungan pada implementasi kebijakan, kemungkinan besar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan awal. Sedangkan, apabila para pelaksana menunjukkan sikap negatif maupun menolak dari implementasi kebijakan dikarenakan adanya konflik kepentingan, sehingga implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan yang signifikan.

4. Struktur birokrasi yang kompleks dalam implementasi kebijakan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Ketidaksiesuaian struktur birokrasi dapat mengakibatkan ketidakefektifan dan memperlambat pelaksanaan kebijakan. Sehingga Memahami struktur birokrasi adalah hal yang sangat penting dalam menganalisis penerapan kebijakan publik.

Gambar 2.2 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III



Sumber: Edwards III, 1980:148

Teori implementasi kebijakan dalam konteks hubungannya dengan penelitian dapat dijelaskan melalui pandangan Edward III sebagaimana yang disampaikan dalam Reza Herdasari (2010:29) :

1. Komunikasi, terkait dengan cara kebijakan disampaikan kepada masyarakat umum,
2. Sumber daya, yang mencakup ketersediaan dukungan sumber daya dan keahlian pelaksana kebijakan, memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan,
3. Disposisi, merujuk pada ketersediaan implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut,
4. Struktur birokrasi, berkaitan dengan bagaimana organisasi birokrasi menyelenggarakan kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu melalui proses/teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Menurut Pramono (2020) dalam (Pitaloka & Novaria, 2024) bahwa Implementasi kebijakan adalah proses di mana berbagai pelaksana terlibat untuk mencapai hasil yang berdasarkan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Implementasi bisa berhasil dilakukan ketika tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan dengan jelas. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini menerapkan teknis analisis data menurut Edward III. Teknik pengumpulan datanya menggunakan smartphone untuk merekam suara dan mengambil gambar sebagai bukti dokumentasi, buku, serta alat tulis seperti bulpoin yang digunakan dalam mencatat hal-hal penting ketika proses wawancara dan observasi itu berlangsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan di Hutan Mangrove Wonorejo.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat dianalisis menggunakan indikator yang ada dari teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III yang meliputi:

Pembahasan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III

Implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pemberdayaan sumberdaya Hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo telah tercipta melalui berbagai kegiatan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkannya. Hutan mangrove ini resmi dibuka sejak tahun 2010, Kawasan hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo dikelola oleh pemerintah setempat, dan dipelihara serta dilindungi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dalam pengelolaannya Hutan Mangrove Wonorejo selalu dikordinir pihak pengelola hutan mangrove dan masyarakat sekitar, Secara konsisten, upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan perlindungan serta pemanfaatan hutan mangrove di daerah pesisir pantai melalui kegiatan konservasi yang terencana. Pemanfaatan lahan konservasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan ekonomi serta upaya pemberdayaan masyarakat lokal di daerah hutan mangrove. Perlindungan yang diberikan kepada kawasan hutan mangrove mencerminkan prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Kegiatan memulihkan hutan mangrove pesisir pantai Kelurahan Rua pada tahun 2011 berhasil dilakukan melalui dana yang berasal dari masyarakat setempat. Restorasi hutan mangrove ini sangat penting karena berkontribusi pada pengembalian daerah penyerapan air serta habitat bagi hewan dan tumbuhan.
- a. Pembentukan zona perlindungan di sepanjang pesisir Kelurahan Wonorejo dilakukan dengan membatasi kegiatan masyarakat yang memasuki area hutan bakau, mengontrol aktivitas nelayan, dan mengurangi pencemaran limbah.

1. Komunikasi

Komunikasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemberdayaan sumberdaya yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai yang mengelola Hutan Mangrove Wonorejo. Dimana kebijakan ini tertera pada Pemda Suraaya nomor 12 tahun 2014 tentang kawasan lindung hutan mangrove.

Komunikasi adalah kunci utama dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Ini melibatkan proses mentransfer pengetahuan dan memastikan pemahaman yang jelas di antara individu-individu yang terlibat. Komunikasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pemberdayaan sumberdaya di hutan mangrove Wonorejo sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat, termasuk para akademisi, pemerintah, kelompok, dan masyarakat lokal.

Agustino menyatakan bahwa komunikasi adalah faktor krusial yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif (Agustino, 2016). Implementasi yang efektif bisa dicapai apabila para

pengambil keputusan memiliki pemahaman yang secara dalam mengenai apa yang nantinya dilakukan. Edward III mengidentifikasi tiga variabel ini, dengan transmisi merujuk pada komunikasi yang efektif yang dapat menyebabkan implementasi yang sukses (Mulyono, 2009). Masalah sering timbul dalam penyaluran komunikasi karena terdapat kebingungan atau miskomunikasi, yang diakibatkan oleh kompleksitas birokrasi yang perlu dilewati dari proses komunikasi tersebut, Harapannya adalah agar informasi tidak terdistorsi saat sampai ditengah jalan, sehingga komunikasi yang didapatkan dari pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*) haruslah jelas, tidak ambigu, dan konsisten dalam perintah yang diserahkan untuk implementasinya. Kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo telah melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hutan mangrove di wilayah tersebut telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan partisipasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

2. Sumberdaya

Peneliti telah mengimplementasikan terkait pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Mangrove Wonorejo berdasarkan Prinsip Pemberdayaan Sumber daya. Sumber daya yang dilibatkan dalam program ini tentu saja sumberdaya manusia dan sumber daya alam. Dari kedua sumber ini yang paling mendominasi jalannya program ini adalah sumberdaya alam. Dalam hal ini sumberdaya manusia juga sangat mendukung untuk menjalankan strategi yang sudah dibuat sehingga mendapat bantuan secara merata.

Melalui program ini para pengelola hutan mangrove dapat memperoleh bantuan-bantuan dari pemerintah kota dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Dengan adanya bantuan melalui pemerintah baik berupa anggaran maupun renovasi perbaikan dapat membantu kesejahteraan bagi peneglola dan pengunjung. Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan program rehabilitasi ekosistem mangrove, yang tujuannya guna menghasilkan tenaga kerja dengan profesional, disiplin, kompeten, tanggung jawab, serta bermoral tinggi dalam upaya pemberdayaan sumber daya hutan.

Partisipasi dalam kelompok masyarakat juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung upaya pemberdayaan Sumberdaya di hutan mangrove, ketrampilan serta pengetahuan mengenai pembibitan, penanaman tanaman mangrove, pemeliharaan tanaman mangrove, serta pengolahan hasil tanaman mangrove dapat memberi kemanfaatan melalui pemberdayaan Sumberdaya di hutan mangrove tersebut. Pengetahuan dan ketrampilan pengelola mangrove dan masyarakat sekitar bisa didapatkan dari pendidikan non formal yang diadakan oleh pemerintah yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. pemberdayaan Sumberdaya di hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo bisa dijakankan dengan jika Masyarakat maupun kelompok yang bertempat di daerah mangrove perlu aktif untuk partisipasi dan terlibat dengan langsung untuk menanam bibit mangrove dilapangan, bila mana Masyarakat maupun kelompok tidak aktif dalam menjalankan program, maka secara otomatis pelaksanaan program tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.

3. Disposisi

Tujuan utamanya adanya kebijakan ini yaitu agar masyarakat lebih peduli dengan alam sekitar dan pentingnya hutan mangrove bagi perlindungan adanya

abrasi. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber pengunjung hutan mangrove peneliti menyimpulkan masih kurangnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap implementasi pemberdayaan Sumberdaya di hutan Mangrove merupakan kecenderungan persepsi serta sikap melalui para pelaksana kebijakan dari tugas serta tanggung jawab yang mereka miliki. persepsi serta sikap yang dimiliki dari para pelaksana kebijakan begitu penting guna mengetahui kesuksesan implementasi program berkaitan pada kebijakan hutan mangrove. Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) menegaskan” Kecenderungan maupun disposisi adalah faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan”. Apabila para pelaksana menunjukkan sikap maupun kecenderungan positif serta memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, memungkinkan bahwa implementasi kebijakan dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan awal.

Hasil observasi yang dilaksanakan di Kelurahan Wonorejo sebagian besar bekerja sebagai Nelayan dan Pedagang bisa mengetahui fakta yang terjadi di lapangan, kelompok masyarakat yang tinggal di kawaasan itu Sebagian besar masih kurang tau mengenai manfaat Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Sumberdaya. Sikap serta komitmen yang masih kurang tersebut sering muncul di masyarakat sekitar dan pengunjung, maka Meskipun kegiatan di lapangan tidak mencapai tingkat optimal, hal ini sudah dianggap sebagai hal yang umum bagi tim di lapangan, sehingga setiap masalah dalam kegiatan dapat diidentifikasi dan ditangani secara baik dari pihak pengelola dan masyarakat sekitar. Hal ini terbukti ketika kegiatan penanaman bibit mangrove di lapangan dapat berlangsung lancar meskipun menghadapi beberapa masalah kecil.

4. Struktur Birokrasi

Setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti mengetahui bahwa pengaruh struktur birokrasi yaitu Kebijakan publik yang kompleks membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, dan tingkat keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada struktur birokrasi. Saat struktur birokrasi tidak memberi dukungan pada kebijakan yang ada, sehingga dapat mengakibatkan sumber daya yang tersedia jadi tidak lagi efektif serta memperlambat pelaksanaan kebijakan. Birokrasi menjadi pelaksana kebijakan wajib mampu memberi dukungan keputusan politik melalui cara melaksanakan koordinasi yang efektif. Dua karakteristik yang bisa meningkatkan kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik ialah: melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), melaksanakan SOP yakni sebuah aktivitas rutin yang menjadikan para pegawai (administrator/pelaksana kebijakan/birokrat) guna melakukan berbagai aktivitas di setiap harinya berdasarkan standar yang ditentukan maupun standar minimum yang diperlukan warga.

Struktur Birokrasi pada pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Pemberdayaan Sumberdaya di Hutan Mangrove di Kelurahan Wonorejo telah cukup efektif serta baik, sebab tidak terdapat kendala Ketika membentuk serta melaksanakan struktur birokrasi itu. Struktur birokrasi untuk pelaksanaan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kelurahan Wonorejo tidak menghadapi kendala signifikan, karena telah dibentuk sesuai dengan Rencana

Pengembangan Desa Pesisir (RPDP), peran pengelola hutan mangrove pada hal struktur bagi pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Masyarakat memberikan rekomendasi saja, tetapi dalam hal teknis, mereka yang mengatur pembentukan struktur seperti yang terjadi di kelompok masyarakat pesisir. Maka, Struktur Birokrasi pada Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pemberdayaan Sumberdaya Di Hutan Mangrove di Kelurahan Wonorejo sudah cukup efektif dan baik. Namun, kelompok masyarakat tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri, sehingga mereka sering menunggu petunjuk dari pengelola hutan mangrove. Terkadang, masyarakat juga mengambil keputusan sendiri dalam aspek teknis pelaksanaan program ini. Hal ini menyebabkan beberapa kesulitan dalam pelaksanaannya dan kurangnya target yang spesifik. Meskipun demikian, tujuan dan harapan masyarakat tetap untuk memulihkan hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari upaya Pemberdayaan Sumberdaya di Hutan Mangrove Wonorejo yaitu rendahnya SDM masyarakat sekitar serta tidak paham betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya di wilayah pesisir.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dilajukan, sehingga bisa diambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pemberdayaan sumberdaya di Hutan Mangrove Wonorejo yaitu kurangnya komunikasi dengan baik namun masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove mengungkapkan bahwa sumberdaya sudah berjalan dengan baik dan ada pengaruhnya terhadap peningkatan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan masyarakat sekitar. Adapun masyarakat Desa Wonorejo dapat meningkatkan status sosial ekonomi mereka dengan adanya beberapa kebijakan dan juga adanya disposisi serta struktur birokrasi yang telah berjalan secara baik.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak dari implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pemberdayaan sumberdaya di Hutan Mangrove Wonorejo melalui wawancara dengan pengelola hutan mangrove terhadap masyarakat sekitar kawasan. Kerusakan ekosistem mangrove memiliki dampak negatif yang signifikan. Hal ini termasuk pengaruh langsung terhadap ketersediaan bibit untuk kegiatan budidaya, yang berakibat pada gangguan terhadap kegiatan budidaya laut dan payau secara luas. Pembabatan hutan mangrove juga mengganggu seimbangannya ekosistem ikan laut, dan rusaknya habitat mangrove sebagai tempat tinggal plankton dan berbagai jenis ikan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Saran

Setelah melakukan penelitian kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pemberdayaan sumberdaya di hutan mangrove, maka peneliti membearkan saran sebagai berikut.

Bagi masyarakat Desa Wonorejo

Kegiatan pemberdayaan agar lebih baik diperlukan melibatkan banyak masyarakat dengan cara memberikan ruang khusus atau dapat juga membuka forum melalui online agar lembaga masyarakat yang terlibat agar dapat memahami secara jelas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pemberdayaan sumberdaya masyarakat semakin dikenal oleh masyarakat yang dari daerah lain, sehingga dapat diharapkan dapat menciptakan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sebaiknya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberi pendidikan serta keterampilan untuk masyarakat untuk menggunakan ekosistem mangrove guna meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti melalui pelatihan tentang cara mengelola flora yang ada di mangrove, agar UKM memiliki alternatif lainnya serta dapat mengelola buah dan sayuran mangrove jadi lebih baik. Serta tanaman mangrove lain yang dapat dikelola menjadi oleh-oleh dan lainnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu mengadakan sosialisasi sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 Ayat (1) huruf a, yang bertujuan guna memberi wawasan bagi masyarakat mengenai regulasi hukum yang terkait Kawasan Mangrove. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengadakan pertemuan dengan penduduk berkaitan pada pembebasan lahan di Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya. Sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dari seberapa penting Kawasan Mangrove serta bagaimana memanfaatkannya tanpa merusak, sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam UU Perwali No. 65 Tahun 2011 yang bertujuan melestarikan serta melindungi ekosistem mangrove di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022). *Cegah Abrasi, Tanam 150 Mangrove di Muara Wonorejo - ITATS Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya*. Itats.Ac.Id. <https://itats.ac.id/cegah-abrasi-tanam-150-mangrove-di-muara-wonorejo/>
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arfani, F. (2015, May 16). *Dua hektare Mangrove di Surabaya rusak parah - ANTARA News*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/496447/dua-hektare-mangrove-di-surabaya-rusak-parah>
- Bengen, D. G. (2000). *Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. PKSPL-IPB.
- DKPP Surabaya. (2022, September 9). *Fakta Unik Dibalik Keindahan Hutan Bakau — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya*. DKPP.Surabaya. <https://dkpp.surabaya.go.id/artikel/-fakta-unik-dibalik-keindahan-hutan-bakau.html>
- DKPP Surabaya. (2023). *UPT Kebun Raya Mangrove*. Dkpp.Surabaya. <https://dkpp.surabaya.go.id/UPT-KebunRayaMangrove/>
- Fadjri, F., & Adhyana, A. Z. (2023, June 5). *Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Menghadapi Tantangan Lingkungan di Indonesia – PUSTANDPI*. Pustandpi.Bsilhk.Menlhk. <https://pustandpi.bsilhk.menlhk.go.id/?p=35>

- Gobel, S. F. P., & Wunarlani, I. (2023). Konservasi Mangrove Sebagai Upaya Mendukung Kawasan Ekowisata Di Wilayah Pesisir. *Jambura Journal of Urban and Regional Planning*, 1(01), 41–46. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjurp/article/view/20009>
- Guntur, S. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka.
- Harsono, H. (2006). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Grafindo Jaya.
- Husodo, T., & Fitriani, N. (2012). Sejarah dan Ruang Lingkup Ekologi. *Ekologi*, 14–15.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE.
- Mufid, M. (2019). FIKIH EKOWISATA BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH: STUDI PENGELOLAAN WISATA ALAMHUTAN MANGROVE DI WONOREJO KOTA SURABAYA. *Kajian Hukum Islam*, XIII(1), 83–98.
- Mulyono. (2009, May 28). *Model Implementasi kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL*. UNS. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>
- Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. CV Sinar Baru.
- Pinto, Z. (2016). Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 3(3), 163. <https://doi.org/10.14710/jwl.3.3.163-174>
- Tri Martuti, N. K. (2014). Keanekaragaman Mangrove Di Wilayah Tapak, Tugurejo, Semarang. *Jurnal MIPA Unnes*, 36(2), 113503.
- Tri, W. (2009). Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Wisata Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 1(2), 15–25.
- Turisno, B. E., Suharto, R., & Priyono, E. A. (2018). Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Mangrove Sebagai Upaya Mencegah Rob Dan Banjir Serta Sebagai Tempat Wisata. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 479. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.479-497>
- Wahyuni, S., Sulardiono, B., & Hendarto, B. (2015). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya. *Diponegoro Journal of Maquares*, 4(4), 66–70. www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/maquares/article/download/9775/9496
- Yunan. (2013, May 8). *Universitas Muria Kudus - Universitas Muria Kudus*. Umk.Ac.Id. <https://umk.ac.id/component/content/article/95-pojok-muria/939-tanam-puluhan-ribu-bibit-mangrove-di-hari-bumi?Itemid=1865>